

TANGGAPI LAPORAN MASYARAKAT

# Nurnas dan Evi Yandri Tinjau Batang Maransi

**Padang, Khazanah** --- Dua orang anggota Komisi IV DPRD Sumbar yang membidangi infrastruktur, H. M. Nurnas dan Evi Yandri Rajo Budiman, turun langsung meninjau normalisasi tiga sungai di Kota Padang, yaitu Batang Maransi, Batang Balimbing dan Banda Luruhi, Jumat (10/3).

Seperti diketahui, DPRD Sumbar sejak tahun 2011 lalu telah merancang untuk dilaksanakannya normalisasi tiga sungai tersebut, demi untuk menekan terjadinya banjir di ibukota Provinsi Sumbar ini.

"Sejak 2011, soal Batang Maransi dan dua sungai lain itu, DPRD Sumbar telah menyikapi, ini untuk mengantisipasi dampaknya, karena jika dibiarkan justru akan mengancam kehidupan yang lebih banyak," ujar Nurnas.

Sebab, tukuk laki-laki yang akrab disapa Cak Nurnas ini, keberadaan Batang Maransi itu penting untuk mendukung Sungai Sapih yang dalam pemahaman teknis dan ahli dulunya adalah daerah serapan.

"Tapi karena kemajuan zaman, daerah yang awalnya persawahan menjadi peruntukan lain," ujarnya.

Maransi, Banda Luruhi dan Balimbing, ujarnya, merupakan tiga sungai yang mendesak sekali untuk dinormalisasi, namun seluruh sungai di Padang adalah kewenangan Balai Sungai Wilayah V untuk melakukannya, tentu tidak bisa Pemprov Sumbar turun tangan menormalisasikannya.

Dan sejak tahun 2011 itu juga, kata Nurnas lagi, Balai Sungai V tak pernah mengubrisnya sementara banjir selalu mengancam warga di sepanjang aliran sungai tersebut.

Dan menyikapi itu, lanjut Nurnas, DPRD Sumbar untuk ketika itu Ketua Komisi III Nurnas (saat itu Komisi III masih



Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, H. M. Nurnas sedang mendengarkan keluhan masyarakat saat meninjau Batang Maransi

membidangi infrastruktur-red) terus berupaya melakukan langkah emergency untuk mengurai bencana banjir yang mengancam masyarakat di sana.

"Waktu itu kita panggil Dinas PSDA Sumbar. Untuk antisipasi awalnya PSDA merancang membuat sodetan (memutus dan menghubungkan dengan sungai lain) Banda Luruhi panjang 1,2 KM," ujar H. M. Nurnas.

Setahun kemudian DPRD menyepakati dana Rp48 milyar di APBD Sumbar dan tentang pembebasan lahannya merupakan tanggungan jawab Pemko Padang.

"Pembebasan lahan mangkrak, hingga akhir jabatan walikota waktu itu dijabat Fauzi Bahar. Meski tidak selesai, Pemprov Sumbar tetap menyediakan anggaran. Alasannya, paham kondisi kota Padang dan untuk kenyamanan masyarakat dari ancaman banjir," ujar Nurnas dan menyebutkan meski perhatian dari Balai Sungai tetap tak ada,

Pemprov Sumbar tetap lanjut. Buktinya, tambah Nurnas, sampai hari ini Banda Luruhi sudah menyerap anggaran APBD Sumbar Rp64 miliar meski masih jauh dari tuntas, sedangkan untuk Balimbing baru Rp4,5 milyar," ujar Nurnas.

Karena takut nantinya akan terganjal kewenangan disebabkan masalah normalisasi sungai di Padang tidak merupakan kewenangan Provinsi, maka DPRD Sumbar meminta Pemko Padang harus mengkoordinasikan ke Pemprov untuk rapat dengan Balai Sungai.

"Tiga sungai itu butuh biaya fantastis, mulai pembebasan lahan dan piskinya," ujar Nurnas. Pada peninjauan ke lapangan tersebut, Nurnas minta Dinas PSDA untuk dapat melakukan pengerukan Batang Balimbing karena sudah sangat dangkal dan penuh sedimen dan segera siapkan SID nya.

"Setelah SID selesai, itu akan

ketahuan di mana permasalahannya. Juga untuk antisipasi di dekat Kantor Baznas Padang hingga kebelakang, Dinas PSDA diminta untuk melakukan pengerukan. Alhamdulillah masyarakat dan lurah di sana menjamin mendukung pengerukan itu," ujar Nurnas.

Selain itu disuulkan anggaran pada 2024 untuk membangun turap sepanjang 500 meter.

"Dan kiri kanan termasuk pada abdomen jembatan juga diperbaiki," ujar Nurnas.

Turunnya kedua anggota Komisi IV tersebut meninjau ketiga Sungai tersebut, tidak terlepas dari adanya laporan warga resah karena penekimannya terendam banjir jika hujan dengan durasi sedang dan lama.

Dinas PSDA sendiri dalam peninjauan tersebut ke Evi Yandri menyatakan kesiapan untuk mengerjakan meski sifatnya sementara, seperti pengerukan dan pembangunan turap. ■ jer

## Wartawan Parlemen Jembatan Publikasi DPRD Bukittinggi

**Bukittinggi, Khazanah** - Keberadaan Wartawan Parlemen (WP) di Kota Bukittinggi, khususnya di lingkungan kantor DPRD mendapat sambutan positif dari Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial.

Didampingi Yudi, Kepala Bidang Risetlah ketika pertemuan membahas kinerja WP kedepannya, Beny Yusrial mengakui, WP Kota Bukittinggi yang berada di DPRD Kota Bukittinggi, turut serta mempublikasikan kegiatan-kegiatan lembaga ini.

"Dalam mempublikasikan tersebut yang ditayangkan pada media harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999," katanya.

Kode etik jurnalistik, tuturnya, merupakan nilai dasar dalam bidang jurnalistik yang wajib diterapkan oleh jurnalis untuk memproduksi berita. Kode etik tersebut merupakan etika profesi jurnalistik yang telah ditetapkan oleh dewan pers.

"Fungsi KEJ untuk menjaga standar kualitas jurnalis dalam melakukan pekerjaannya secara profesional dan berita yang dirilis dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Dikatakan Beny Yusrial, dengan adanya WP di lingkungan DPRD, kiranya dapat membantu mengeskos kegiatan-kegiatan DPRD untuk dipublikasikan pada media masing-masing. Jika sekiranya ada yang ingin dipublikasikan, lebih jelasnya tanyakan terlebih dulu kepada narasumber, apakah itu Ketua, Wakil ketua dan anggota DPRD termasuk Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi.

"Maksudnya agar terarah dalam mempublikasikannya dan tidak keluar dari bahan pembicaraan narasumber, dan jika ada publikasi yang tidak benar, kawan-kawan WP dapat menentris agar pembaca dapat mengetahuinya," pesan Beny Yusrial.

Sedangkan Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, SE, M.Si mengapresiasi adanya WP Kota Bukittinggi di lingkungan DPRD. Sebab, dengan keberadaan WP Kota Bukittinggi dapat melakukan perpanjangan tangan dari sosialisasi semua program-program DPRD dalam pelaksanaan fungsi registrasi, penyelenggaraan dan pengawasan.

Ade Mulyani berharap dengan adanya kawan-kawan WP Kota Bukittinggi bisa mempublikasikan pada media masing-masing, baik itu media cetak, online dan elektronik, tentunya dengan secara profesional dalam menuliskannya. Sehingga publik atau masyarakat dapat tersosialisasi dengan program-program yang ada tersebut, ungkap Ade Mulyani wanita pertama menjabat sekretaris DPRD Kota Bukittinggi. Dikarenakan dunia teknologi semakin maju, maka WP Kota Bukittinggi selain mempublikasikan pada media masing-masing, kini WP Kota Bukittinggi sedang merancang peningkatan kinerja publikasi melalui streaming pada media sosial seperti youtube dan media sosial lainnya. Rancangan ini mendapat apresiasi dari Ketua, Wakil Ketua, anggota dan Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi, semoga tetap eksis dan maju dalam kinerja. ■ Iwin SB

## Baznas Agam Kerahkan 15 Relawan Himpun Potensi Zakat

**Lubukbasung, Khazanah** - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Agam memiliki sebanyak 15 orang relawan dalam menghimpun seluruh potensi zakat, infak dan sedekah selamat Ramadhan 1444 Hijriah.

Ketua Panitia Pelaksana Supriadi di Lubukbasung, Minggu, mengatakan ke 15 orang relawan itu merupakan hasil rekrutmen beberapa waktu lalu yang akan mengumpulkan zakat selama Ramadhan 1444 Hijriah.

"Mereka telah dilantik oleh Ketua Baznas Agam Idman Imran di Kantor Baznas Agam pada Sabtu (11/3)," katanya.

Ia mengatakan setelah mereka dilantik maka perlu juga diberi pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dalam mengumpulkan zakat.

"Kita tanamkan pada mereka bahwa Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dapat mengantarkan kemiskinan khususnya di Agam," katanya.

Ia berharap pemahaman mereka bertambah yang dapat diandalkan. Tidak hanya selama jadi relawan tapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Baznas Agam Isman Imran menambahkan Ramadhan bulan yang penting bagi pengelola zakat dalam memberikan layanan kepada para muzaki dan mustahik.

"Kita terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan zakat, salah satunya merekrut relawan yang akan mengumpulkan zakat selama Ramadhan tahun ini," katanya.

Menurutnya, ini momen yang tepat untuk peningkatan zakat, karena dalam Ramadhan masyarakat akan berlomba-lomba melaksanakan ibadah dan mengamalkan amalan solehnya.

"Kita berharap para relawan bekerja dengan maksimal dalam mengumpulkan zakat, serta menyosialisasikan Baznas Agam pada masyarakat," katanya. ■ ant



Ketua Baznas Agam Isman Imran bersama relawan Ramadhan, Dok Humas Pemkab Agam

### DIBANDING BERAS IMPOR

## Harga Beras Lokal di Pasar Bawah Kalah Bersaing

**Bukittinggi, Khazanah**- Penjualan beras lokal masih dikategorikan mahal dikarenakan adanya pasokan beras impor yang juga disediakan. Beras impor seperti beras dari Thailand dijual per kilogramnya seharga Rp10.000,-, sedangkan beras lokal saat ini dijual masih seharga Rp14.000 hingga Rp17.000,- per kilogramnya.

Seperti disampaikan Desma, salah seorang pedagang beras di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, Sabtu (11/3), semenjak masuk beras dari luar negeri atau beras impor harga masih dapat dikendalikan.

"Harga beras lokal sekarang masih mahal, ada turun harganya tapi masih mahal juga nilai jualnya tidak seperti sebelumnya," tukuknya.

Dibandingkan dengan beras impor yang murah harganya dan kualitasnya juga bagus, ujarnya, masyarakat yang membeli beras dagangannya tercatat cenderung cukup banyak yang beralih ke beras impor tersebut diduga harga jualnya yang masih terjangkau.

Desma menyebutkan belajar dari waktu sebelumnya ketika menjelang bulan Ramadhan 1444 H dan selama bulan Ramadhan tahun lalu, harga beras lokal tidak semahal sekarang, tentu jelas



Desma salah seorang pedagang beras di Pasar Bawah Kota Bukittinggi

berbeda situasinya, hingga berdampak pada tingkat penjualan.

Ia ingin Pemerintah Pusat maupun Daerah ikut berperan untuk mengembalikan harga beras lokal seperti waktu biasanya yakni berkisar di harga Rp13.000,- atau Rp13.500,- per kilogramnya. "Ya, kita ingin harga beras lokal ini tidak semahal sekarang," katanya.

Dalam kedainya, Desma tidak menjual beras yang berasal dari Bulog, hingga saat ini masih berlangganan dengan penjual

pasokan (toke) beras untuk memenuhi ketersediaan beras lokal dan beras impor, untuk mendapatkan keuntungan menambah kehidupan dari penjualan beras yang diperjualbelikan tersebut.

Lain halnya Zefri Ade, salah seorang pedagang kentang, mengakui saat ini harga kentang naik dari biasanya, sekarang dijual seharga Rp16.000,- per kilogram untuk kentang ukuran besar dan kentang ukuran sedang dijualnya seharga Rp15.000,- per

kilogram. Sedangkan di waktu sebelumnya kentang ukuran sedang dapat dijual seharga Rp12.000,- per kilogram dan kentang ukuran besar seharga Rp13.000,- per kilogram.

Dikatakannya, saat ini daerah produsen kentang tidak banyak memiliki stok dikarenakan gagal panen, bahkan pilihan tertentu pada kentang Kerinci, di Alahan Panjang sekarang penuh banyak yang pindah budidaya tanaman lain, yaitu bawang. Jadi pilihan sekarang banyak yang ambil

kentang dari Kerinci. Zefri Ade menyebutkan dirinya estimasikan harga kentang di kisaran Rp15.000,- hingga Rp16.000,- per kilogram ini masih

akan bertahan jelang dan selama bulan Ramadhan nanti, kalau bulan Ramadhan tahun lalu harga kentang masih Rp12.000,- hingga Rp13.000,-. ■ Iwin SB

Mau Pasang Iklan atau Berlangganan Koran? **KHA JAMBA** Hubungi : 0751 - 8952449

Sayangilah Mata Depan Mu **KHA JAMBA** **JAUIH NARKOBA!** *Pelopor Beras Tanpa Narkotika*

### BERITA KEHILANGAN

**STNK sepeda motor BA 5494 BF an. LISMAWATI, hilang di sekitar Jalan Gajah Mada Gunung Panglun Padang. Mohon antar ke pos polisi terdekat.**